
ARTICLE

Implementasi Program Pola Asuh dan Pendidikan Anak PMI Berbasis PAKEM Indonesia (Studi Desa Sumbergede Lampung Timur)

Khozin Asrori¹, Meiliyana², Ani Agus Puspawati³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Asrori, K., Meiliyana, Puspawati, A A., (2023). Implementasi Program Pola Asuh dan Pendidikan Anak PMI Berbasis PAKEM Indonesia (Studi Desa Sumbergede Lampung Timur). *Administrativa* (5) 3

Article History

Received: 5 Juli 2022

Accepted: 3 Oktober 2023

Keywords:

Policy, Implementation, PMI, PAKEM Indonesia

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, PMI, PAKEM Indonesia

ABSTRACT

The large number of PMIs who work abroad has a negative impact, as the parenting pattern for children who are left to work abroad becomes less than optimal. As a result, UPT BP2MI Bandar Lampung offers an alternative solution to these issues in the form of a program called Pandu Families of Indonesian Migrant Workers (Pakem Indonesia). The purpose of this research is to look into the implementation of PMI's Parenting and Child Education Program in Sumbergede Village, East Lampung. This study employed a qualitative approach with a descriptive approach. The results revealed that the implementation of PMI's Parenting and Child Education Program was less effective due to the program's limited budget. In addition to the limited budget, the lack of supporting facilities and infrastructure in the program implementation process is a barrier.

ABSTRAK

Tingginya jumlah PMI yang bekerja keluar negeri pada akhirnya menimbulkan sebuah dampak negatif yaitu pola pengasuhan kepada anak yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri menjadi kurang optimal. Oleh karena itu UPT BP2MI Bandar Lampung memberikan gagasan sebagai alternatif solusi guna mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah program yang bernama Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pakem Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pola Asuh dan Pendidikan Anak PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pola Asuh dan Pendidikan Anak PMI berjalan kurang efektif, dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program. Selain terbatasnya anggaran yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang dalam proses implementasi program.

* Corresponding Author

Email : bagusadhityapratama14@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2020). Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada diposisi ke-empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak di kawasan Asia.

Terjadinya proses migrasi dipengaruhi dengan adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan migrasi adalah adanya *push and pull factors* (faktor pendorong dan faktor penarik) terjadinya migrasi. Faktor yang menjadi pendorong untuk melakukan migrasi adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk meninggalkan negara asal, sedangkan faktor penarik adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi arus masuk migrasi (Haryono, 2017).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) angka pekerja migran dari tahun ke tahun, jumlahnya fluktuatif yang cenderung mengalami peningkatan. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Orberta jr et al dalam (Noveria, 2017) akibat dari banyaknya PMI yang bekerja ke luar negeri, menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penyumbang tenaga kerja migran internasional terbesar di kawasan Asia. Dengan tingginya sumbangan pekerja migran, hal ini menjadikan Indonesia dalam sembilan negara pengirim tenaga kerja terbanyak yang ada di Asia (Noveria, 2017). Berikut data PMI periode tahun 2017-2022.

Tabel 1. Data PMI Tahun 2017-2020

No	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	262.899
2.	2018	283.640
3.	2019	276.553
4.	2020	113.173

Sumber : UPT BP2MI Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan data tabel 1 terjadi peningkatan jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sebanyak 20.741 pada periode tahun 2017-2018. Dengan rincian pada tahun 2017 jumlah pekerja migran sebanyak 262.899 orang meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 283.640 pekerja migran atau jika dihitung dalam jumlah persentase maka peningkatan jumlah pekerja migran pada tahun 2017 sampai dengan 2018 telah terjadi peningkatan sebesar 7,8%. Sementara pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 justru terjadi penurunan angka pekerja migran sebesar 7.087. Dengan rincian jumlah pekerja migran pada tahun 2018 sebanyak 283.640 menjadi sebanyak 276.553 pekerja migran pada tahun 2019. Dengan kata lain apabila dihitung dalam persentase maka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi penurunan sebesar 2,5%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka PMI kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebanyak 276.553 PMI menjadi 113.173 PMI atau telah terjadi penurunan sebesar 59% dari tahun sebelumnya akibat dari adanya pandemi covid-19.

Tingginya antusias masyarakat untuk bekerja ke luar negeri pada akhirnya memberikan sebuah dampak. Baik itu dampak yang sifatnya positif maupun dampak yang sifatnya negatif.

* Corresponding Author

Email : bagusadhityapratama14@gmail.com

Dampak positif dari tingginya antusias masyarakat untuk dapat bekerja ke luar negeri yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara dari sektor sumbangan devisa yang diberikan oleh PMI dari pengiriman remitansi (Ndarujati, 2021).

Sementara dampak negatif dengan tingginya PMI yang bekerja ke luar negeri maka akan menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.. Terlebih karena sebagian besar PMI didominasi oleh wanita. Sehingga wanita yang bekerja sebagai PMI harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan. Status wanita sebagai PMI terlebih wanita yang telah berkeluarga memiliki dampak terhadap keutuhan keluarganya (Anggraini et al., 2020)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua yang bekerja sebagai PMI cenderung lebih banyak mengalami permasalahan psikososial. Beberapa permasalahan psikososial yang terjadi seperti gangguan emosional pada anak, kecenderungan anak yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, hiperaktif, cenderung lebih pasif dalam setiap menghadapi permasalahan, dan yang terberat adalah terjadinya stres dengan kategori tinggi yang dialami oleh anak (Puspitawati & Setioningsih, 2011).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) fenomena mengenai kecenderungan anak PMI yang mengalami permasalahan psikososial terjadi juga di Desa Sumbergede. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sumbergede permasalahan pada anak PMI seperti kurang optimalnya pengasuhan bagi anak, anak yang mulai mengenal pergaulan bebas sehingga mulai merokok, mengonsumsi miras dan kenakalan remaja lainnya.

Selain itu karena lebih banyak ibu yang menjadi PMI dibanding ayah, pada akhirnya menyebabkan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan dari ayah yang bersangkutan kurang begitu cakap dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sehingga pengasuhan anak dibebankan kepada kerabat terdekat seperti nenek/kakek, paman/bibi ataupun sanak saudara yang lain. Peran dalam pengasuhan yang dilakukan oleh kerabat seringkali cenderung kurang maksimal.

Anak yang diasuh oleh kerabat terdekat seperti kakek/nenek justru kerap menunjukkan perilaku yang bermasalah (maladaptif), mengalami gangguan emosional, dan bahkan tidak patuh pada pengasuh. Hal ini merupakan akibat dari kurang sesuainya pola pengasuhan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan model pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada anak pekerja migran (Nurannisa et al., 2017).

Dengan adanya permasalahan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau UPT BP2MI Bandar Lampung berupaya untuk memberikan alternatif solusi. Hal ini dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut agar dampaknya tidak terjadi secara berkepanjangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi sebuah program yang bersinergi dengan Pemerintah Desa Sumbergede Lampung Timur. Bentuk inisiasi yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandar Lampung adalah dalam bentuk program standar pola pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga PMI yang ditinggal bekerja ke luar negeri.

Program yang diinisiasi oleh UPT BP2MI Bandar Lampung tersebut diberi nama program Pakem Indonesia. Program Pakem Indonesia atau yang merupakan kepanjangan dari Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah sebuah program yang bersinergi antara UPT BP2MI dan beberapa aktor lain yang ikut terlibat. Beberapa aktor yang terlibat dalam program ini diantaranya Pemerintah Desa Sumbergede, PKK Desa Sumbergede, dan Karang Taruna Desa Sumbergede, Kabupaten Lampung Timur sebagai stakeholder dari program ini. Program ini

merupakan salah satu bentuk perwujudan atas perlindungan sosial bagi PMI dan keluarganya (Mubarika, 2020).

Program Pakem Indonesia merupakan sebuah program yang berasal dari proyek hibah mikro pada tahun 2020. Program ini muncul dari sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berasal dari *American Council of Young Political Leader (ACYPL)* yang berhasil diraih oleh salah satu pengantar kerja UPT BP2MI Bandar Lampung. Program ini diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State*. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu mempelajari tentang berbagai program sosial bagi keluarga PMI khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga bagi PMI. Konsep Program Pakem Indonesia diadopsi dari Program *Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)* 2019 yang mana program tersebut diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State* (Mubarika, 2020).

Program ini secara jelas mengatur tentang tata cara pemberdayaan kelompok marjinal khususnya yang ada di Amerika Serikat, yaitu kalangan imigran dan pengungsi. Mengingat program Pakem Indonesia ini mengadopsi program YSEALI maka kurikulum yang digunakan dalam program ini pun menggunakan kurikulum yang hampir sama. Kurikulum yang digunakan dalam program ini yaitu kurikulum *Guiding Good Choices (GGC)* yang dikembangkan oleh *University of Washington*. UPT BP2MI Bandar Lampung selaku penanggung jawab dalam program ini tidak sebagai aktor tunggal, melainkan juga melibatkan *stakeholder* lain sebagai aktor dalam setiap penyelenggaraan program tersebut (Mubarika, 2020).

Masing-masing *stakeholder* tersebut membangun relasi antar aktor sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Sumbergede bertindak sebagai aktor pelaksana atau *Level Street Bureaucracy* dari program yang dibantu dengan beberapa perangkat desa seperti PKK, Karang Taruna, dan masyarakat desa. Sementara peran UPT BP2MI dalam program ini adalah sebagai inisiator program, yang selanjutnya dalam proses pelaksanaan program ini UPT BP2MI berperan dalam hal *monitoring* terkait dengan proses pelaksanaan program.

Peran antar-aktor begitu penting dalam melakukan sinergi dalam proses pelaksanaan program ini. Agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan efektif maka perlu memperhatikan secara serius dalam proses implementasinya. Khususnya dari para implementor utama pelaksana program dalam hal ini Pemerintah Desa Sumbergede dan UPT BP2MI Bandar Lampung sebagai pihak yang melakukan *monitoring* program.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut teori dari Jones diartikan sebagai sebuah proses menjalankan sebuah program sampai akhirnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sementara Implementasi menurut Grindel diartikan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh birokrat yang berkaitan dengan hal yang bersifat administratif pada sebuah program tertentu (Rafi'i et al., 2020). Sedangkan definisi mengenai implementasi dalam kamus besar *Webster* diartikan sebagai sebuah proses penyediaan sarana guna melaksanakan sebuah tujuan tertentu. Pengertian ini didukung oleh pendapat dari ahli lain yaitu Ripley dan Franklin yang mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang dilakukan setelah adanya sebuah regulasi yang berkaitan dengan berbagai unsur dari sebuah kebijakan khususnya dalam mencapai sebuah tujuan tertentu (Edoardus E. Maturbongs, 2012).

Implementasi pada dasarnya merupakan hal yang semestinya dilakukan setelah program atau kebijakan telah ditetapkan. Dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan aktor yang terlibat didalamnya tak hanya dari instansi atau lembaga yang terkait dengan kebijakan yang

bersangkutan. Melainkan dalam proses implementasinya akan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekuatan politik, sosial bahkan ekonomi dari pihak tertentu (Rafi'i et al., 2020).

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang dijelaskan oleh para ahli. Model implementasi kebijakan diantaranya dijelaskan oleh Edward III, Robbins, dan Soren C Winter. Dari ketiga model implementasi tersebut, banyak ahli yang menaruh perhatian lebih pada model implemementasi yang dikemukakan oleh Soren C Winter. Hal itu dikarenakan model implementasi ini tergolong ke dalam kategori model implementasi generasi ketiga atau dengan kata lain merupakan model implementasi kebijakan yang cenderung baru. Semua itu didasarkan pada konsep yang diterapkan pada model implementasi ini yaitu sebuah model yang dikenal dengan istilah *Integrated Implementation Model* (Winter, 2004).

Pada model ini, lebih menitikberatkan bahwa dalam sebuah proses implementasi kebijakan tidak dapat berdiri secara sendiri melainkan ada aspek lain yang ikut mempengaruhi dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu pada model ini terdapat sebuah padangan mengenai konsep *model integrated*. *Model integrated* diartikan bahwa dalam implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkesinambungan yang dimulai dari tahap kebijakan yaitu formulasi hingga evaluasi. Sehingga pada model implementasi ini tidak terlepas dari proses politik dan administrasi.

Pada dasarnya model implementasi kebijakan ini begitu erat kaitannya pada bentuk desain kebijakan. Dalam hal ini *design* kebijakan berpengaruh dalam proses formulasi kebijakan yang akan menentukan arah sebuah kebijakan akan berjalan. Selain itu pada proses ini juga dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Pada model ini lebih menekankan bahwa sebuah implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari kebijakan itu dijalankan (Winter, 2004).

Sejalan dengan hal itu, menurut Winter sebuah implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan aspek yang saling berkesinambungan dan mempengaruhi antarsatu sama lain. Dalam hal ini menurut Winter implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perilaku Organisasi dan Antar-organisasi.

Pada unsur yang pertama yaitu perilaku organisasi dan antarorganisasi memiliki dua dimensi di dalamnya yaitu dimensi komitmen dan dimensi koordinasi. Dalam proses sebuah implementasi kebijakan tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan memerlukan peran dari pihak lain dalam upaya mencapai sebuah tujuan dari implementasi kebijakan. Pentingnya peran dari organisasi lain dalam upaya untuk dapat mencapai sebuah tujuan dari kebijakan publik akan memerlukan sebuah hubungan yang terjalin antarorganisasi. Hubungan antarorganisasi ini akan memberikan dampak perubahan dari sebuah kebijakan yang bersifat berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam sebuah tindakan dari implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Selain itu, di sisi lain proses implementasi yang dipengaruhi oleh perilaku organisasi dan hubungan antarorganisasi maka akan berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi kinerja pada sebuah kebijakan publik.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah.

Dimensi yang terdapat pada perilaku birokrasi level bawah adalah diskresi. Dalam KBBI online istilah diskresi dapat diartikan sebagai suatu kebebasan sikap dalam mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi situasi dan kondisi tertentu (KBBI, 2021). Dimensi ini menjadi penting dalam implementasi kebijakan, mengingat implementor kebijakan dituntut untuk mampu menjalankan atau melaksanakan sebuah program agar dapat membuat sebuah keputusan penting dalam upaya mencapai tujuan dari sebuah implementasi kebijakan. Kemampuan ini wajib dimiliki oleh implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik

tak jarang para implementor dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan pengaruh faktor dominan di luar kewenangan formal yang dimiliki.

Sejalan mengenai hal itu, menurut Lipsky bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan birokrasi level bawah atau yang sering dikenal dengan istilah *level street bureaucracy* memiliki pengaruh yang dominan dalam sebuah implementasi kebijakan. Peran dari birokrasi level bawah ini pada dasarnya akan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan langkah atau cara apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga dalam praktik pelaksanaan suatu kebijakan publik peran dari birokrasi level bawah ini akan berkaitan langsung dengan masyarakat ataupun suatu grup sasaran dari sebuah kebijakan.

3. Perilaku Kelompok Sasaran.

Aspek yang ketiga, yaitu kelompok sasaran atau yang biasa dikenal dengan istilah *Target Group Behavior* memiliki dimensi yaitu berupa respon positif dan respon negatif dari masyarakat atau kelompok yang menjadi target dari kebijakan terkait. Pada aspek perilaku kelompok sasaran ini akan mempengaruhi secara langsung mengenai beberapa aspek yang ada dalam sebuah implementasi kebijakan. Dalam hal ini perilaku kelompok sasaran akan mempengaruhi aspek seperti kinerja birokrat ataupun birokrasi level bawah sebagai implementor, dan juga akan mempengaruhi terhadap dampak dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal itu dikarenakan respon yang diberikan oleh target sasaran kebijakan yang juga bertindak sebagai objek dari pelaksanaan sebuah kebijakan akan dijadikan sebagai salah satu acuan apakah sebuah kebijakan sudah dijalankan dengan semestinya atau justru sebaliknya.

Pada aspek perilaku kelompok sasaran dalam sebuah implementasi program atau kebijakan publik dapat diartikan sebagai sekelompok orang, organisasi, ataupun individu yang akan menjadi objek dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dapat memberikan respon pada proses implementasinya baik itu berupa respon positif ataupun negatif. Sehingga kinerja implemementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat dalam merespon setiap pelaksanaan kebijakan yaitu berupa dukungan ataupun penolakan. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi.

C. METHOD

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Desa Sumbergede Lampung Timur, alasan penulis memilih lokasi ini karena Desa Sumbergede merupakan pelopor dari program Pakem Indonesia sekaligus tempat berlangsungnya program. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan juga primer dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan temuan penelitian di lapangan saat penelitian berlangsung, baik hasil yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa informan, observasi, maupun dokumentasi berkaitan dengan implementasi Program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur. Peneliti menyajikan uraian hasil penelitian dan mengukur dengan menggunakan indikator-indikator dalam implementasi kebijakan dengan model konseptual yang dikenalkan oleh Soren C Winter yang dikenal dengan sebutan *Integrated Implementation Model*. Pada model implementasi ini menggunakan 3 indikator dalam mengukur keberhasilan sebuah implentasi yaitu perilaku organisasi dan antar-organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku target sasaran.

Pola Asuh dan Pendidikan Anak

1. Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai Subkoor Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Bandar Lampung dapat diketahui bahwa sebelumnya UPT BP2MI Bandar Lampung memiliki program sejenis, yang diberi nama PELITA namun secara substansi Pakem lebih komprehensif. Sehingga UPT BP2MI Bandar Lampung berkomitmen penuh untuk mendukung proses pelaksanaan program ini. Salah satu bentuk komitmen yang ditunjukkan oleh UPT BP2MI Bandar Lampung dalam menjalankan program ini yaitu dengan memasukan program ini ke dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Hal ini dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal terciptanya program.

Sejalan dengan hal itu, bentuk komitmen yang dilakukan oleh aparatur Desa Sumbergede selaku aktor birokrasi level bawah dalam menjalankan program yaitu dalam bentuk penerapan pola asuh dan pendidikan bagi anak PMI yang dilakukan dengan membuat sebuah perpustakaan mini guna memfasilitasi proses pelaksanaan pola asuh dan pendidikan bagi anak PMI Desa Sumbergede.

Sementara proses koordinasi berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses koordinasi dapat dilakukan dengan baik dan tidak ada hambatan. Koordinasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan antar kedua belah pihak dalam menjalankan program. Proses koordinasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari upaya membangun jejaring komunikasi antar kedua belah pihak dalam hal saling ketergantungan dalam mengelola kegiatan agar tercapainya tujuan dari implementasi program.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malon yang dikutip dalam Maslo yang mengungkapkan bahwa koordinasi adalah tindakan yang saling ketergantungan untuk mengelola antara kegiatan agar tercapainya tujuan program dengan baik. Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Malon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi dalam menjalankan program dapat berjalan dengan baik.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Berdasarkan data hasil penelitian, diskresi yang dilakukan oleh birokrasi level bawah dalam hal ini yaitu aparatur Desa Sumbergede yaitu dengan adanya pembuatan perpustakaan mini dalam upaya memaksimalkan pola pengasuhan dan pendidikan kepada anak PMI yang ada di Desa Sumbergede. Hal ini menjadi salah satu bentuk diskresi yang dilakukan oleh birokrasi level bawah dalam hal melakukan penyesuaian dalam upaya memberikan pendidikan kepada anak PMI sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak desa.

Terlebih dalam hal pola asuh dan pendidikan bagi anak PMI tidak diatur secara jelas mengenai lanjutan keberlangsungan dalam memberikan pola asuh bagi anak PMI. Sehingga pihak desa melakukan diskresi dalam bentuk inisiasi membuat perpustakaan mini sebagai sarana untuk memberikan bimbingan belajar kepada anak PMI. Oleh karena itu pembentukan perpustakaan mini yang dilakukan oleh pihak desa dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskresi yang ditunjukkan oleh aparat desa dalam hal pola asuh dan pendidikan bagi anak PMI.

Hal ini sesuai dengan definisi mengenai diskresi yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Berdasarkan data hasil penelitian, perilaku kelompok sasaran yang dalam hal ini yaitu keluarga PMI Desa Sumbergede dalam merespon adanya program yaitu berupa respon respon

positif dan negatif. Respon positif yang ditunjukkan oleh target sasaran yaitu berupa dukungan yang diberikan oleh masyarakat Sumbergede terhadap keberlangsungan program. Hal itu dikarenakan dengan adanya program ini dianggap sangat membantu masyarakat khususnya keluarga PMI dalam memberikan pola pengasuhan yang sesuai dengan standar pengasuhan. Terlebih dengan kondisinya mayoritas warga Desa Sumbergede yang berprofesi sebagai petani, sehingga dengan adanya program ini juga membantu anak PMI dalam hal pendidikan karena telah disediakan perpustakaan mini untuk dijadikan tempat bimbingan belajar bagi anak PMI.

Sementara respon negatif dari masyarakat ditunjukkan berupa kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa terkait dengan program ini. Hal itu dapat diketahui dari kurang teraturnya jadwal bimbingan belajar bagi anak-anak. Sehingga tak jarang anak-anak mengalami kebingungan karena tidak adanya kepastian jadwal bimbingan belajar yang dilakukan.

Faktor Yang Mempengaruhi

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh faktor rasa empati yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Sumbergede khususnya sesama warga yang ditinggal bekerja ke luar negeri oleh salah satu anggota keluarganya. Sehingga rasa empati tentang kesamaan nasib yang dialami menjadi salah satu pendukung dari proses pelaksanaan program. Selain itu faktor pendukung lain yaitu berupa respon positif yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai adanya program ini yang dianggap dapat mengatasi permasalahan bagi anak PMI yang ada di Desa Sumbergede.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan program ini dapat dibagi menjadi dua hal yaitu yang pertama faktor penghambat yang berasal dari Desa dan yang kedua yaitu faktor penghambat yang berasal dari UPT BP2MI Bandar Lampung. Faktor penghambat yang muncul dari desa diantaranya adalah mengenai alokasi anggaran program yang berasal dari dana desa yang jumlahnya minim, kurangnya fasilitas penunjang program serta tidak adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam menjalankan program. Sementara faktor penghambat yang berasal dari UPT BP2MI Bandar Lampung adalah mengenai politik anggaran bagi program ini yang notabene program ini bukan merupakan program prioritas dari BP2MI sehingga ketika diusulkan untuk masuk dalam DIPA 2022 masih mengalami penundaan.

E. PENUTUP

Simpulan

Implementor Program Pakem Indonesia yaitu aparat Desa Sumbergede pada program ini memberikan komitmen sepenuhnya dalam menjalankan program. Komitmen ditunjukkan dengan adanya pembuatan perpustakaan mini sebagai sarana untuk memberikan pendidikan bagi anak PMI. Pembuatan perpustakaan mini ini sebagai bentuk diskresi yang dilakukan oleh aparat desa dalam menjalankan program. Sementara respon masyarakat sebagai target sasaran mengenai adanya program ini yaitu terbagi ke dalam dua hal yaitu respon positif dan respon negatif. Respon positif ditunjukkan oleh masyarakat dengan cara menyambut baik adanya program tersebut karena masyarakat menganggap bahwa dengan adanya program ini dapat mengatasi permasalahan mengenai pola asuh dan pendidikan anak PMI. Sementara yang menjadi respon negatif dari masyarakat yaitu mengenai kurangnya informasi yang berkaitan dengan program ini dan belum adanya kepastian dari jadwal pendidikan dan pola asuh yang diberikan.

Faktor yang mempengaruhi proses implementasi program yaitu berupa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dari implementasi program yaitu berupa empati yang

ditunjukkan masyarakat dan respon positif masyarakat tentang adanya program ini. Sementara faktor yang menjadi penghambat dari implementasi program yaitu berkaitan dengan minimnya anggaran dan fasilitas serta sarana prasarana penunjang dalam melaksanakan program. Minimnya anggaran ini disebabkan karena seluruh pendanaan program ini hanya berasal dari alokasi anggaran dana desa dan tidak memiliki sumber pendanaan lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Implementasi Program Pola Asuh dan Pendidikan Anak PMI Berbasis PAKEM INDONESIA (Studi Desa Sumbergede Lampung Timur) peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Aktor pelaksana program sebaiknya mulai memikirkan mengenai alternatif sumber anggaran dalam menjalankan program dan tidak hanya bertumpu pada anggaran dana desa semata agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala dari segi anggaran.
2. Perlu adanya kepastian jadwal pelaksanaan pendidikan bagi anak agar yang bersangkutan tidak mengalami kebingungan pada saat akan mengikuti proses pendidikan tersebut.

REFERENCES

- Anggraini, P., Monanisa, M., & Arafat, Y. (2020). Dampak Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(1), 35. h
- BPS. (2020). BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020.
- Charli, C. O., Sari, P. I. P., & Ade, F. S. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam). *Procuratio: Jurnal ...*, 3(1), 1–10.
- Edoardus E. Maturbongs. (2012). Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial "Societas,"* 1(1), 52–63.
- Hamid, A. (2019). Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) (Issue 18). Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Haryono. (2017). Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan). *Jurnal Hermeneutika*, 3(2), 25–36.
- Juliawati, N. (2012). Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi : Sebuah Kerangka Studi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8, 76–91.
- Khuana, J. R. (2020). Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1275.
- Mubarika, U. (2020). Penguatan Peran Desa melalui Program Pandu Keluarga PMI. <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/penguatan-peran-desa-melalui-program-pandu-keluarga-pmi>
- Ndarujati, D. (2021). *Jurnal Sosial Sains*. Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan, 1(1), 30–34.
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25.
- Nurannisa, H., Hasanah, U., & Tarma, T. (2017). Pengaruh Granparenting Terhadap Perkembangan Emosi Remaja Pada Keluarga Tki Di Kecamatan Gekbrong Cianjur-Jawa Barat. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(02), 62–65.

- Puspitawati, H., & Setioningsih, S. S. (2011). Fungsi Pengasuhan dan Interaksi Dalam Keluarga Terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Ilmiah Keluarga Dan Konseling*, 4(1).
- Putri, A. N., Riany, W., & Julia, A. (2019). Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi Internasional (Studi Kasus : TKI dan TKI Purna di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Prosiding Ilmu Ekonomi*.
- Rafi'i, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 6 No. 1 Februari 2020, 6(7), 1099–1104.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 218–231.
- Winter, S. C. (2004). *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. *Handbook of Public Administration*. Sage Publications Ltd.

